

2017 - 2022



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 90 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu merubah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam *huruf a*, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedomanan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03).
26. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo 2010 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 284);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 303);
31. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022, (Berita Dalam Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 668);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BOALEMO TAHUN 2017 – 2022**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 668), diubah sebagai berikut :

Pasal 4

Perubahan isi dan uraian sistematik Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 23 Agustus 2018



BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 23 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOALEMO,**


H. A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 710.....)

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Boalemo menyusun Renstra tahun 2017-2022, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan guna mewujudkan Misi 1 Bupati dan Wakil Terpilih **“Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai”** yaitu Focus pada Program 2 Yaitu Melalui Berusaha memberi rasa keadilan kepada seluruh kelompok dan profesi masyarakat dalam hal keadilan dalam penyebaran Informasi komunikasi Publik.

Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua kegiatan diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan Renstra ini. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Iptek, dan tantangan pembangunan ke depan, Materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Tilamuta, Desember 2017
KEPALA DINAS,
DISKOMINFO
STATISTIKA & PERSANDIAN

Ir. Mans Mopangga
NIP. 19650418 200005 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Bab I Pendahuluan	1
I.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan hukum	2
1.3 Maksud Dan tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
II.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Boalemo	8
II.2 Sumber Daya Dinas Kominfo Kabupaten Boalemo	23
II.3 Kinerja Pelayanan Dinas KOMINFO BOALEMO	26
II.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Kominfo.....	35
Bab III Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	38
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	38
III.2 Telaahan Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Terpilih	41
III.3 Telaahan Resntra K/L Dan Renstra Provinsi	43
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang wialayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi	46
III.5. Penentuan Isu - Isu Strategis	47
Bab IV Tujuan Dan sasaran	49
IV.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	49
Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan	53

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	59
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	60
Bab VIII Penutup	63

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersipat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal.

Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain: keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, kondisi demikian tentu menjadi tugas Negara dalam hal ini pemerintah yang memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat .

Dinas komunikasi informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo sebagai satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang membidangi komunikasi dan informatika tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik dibidang komunikasi Informasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-Government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Boalemo.

e-Government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan Publik secara efisien, efektif, dan interaktif. Merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumber daya aparatur sebagai pelayanan masyarakat.

Mengingat bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo baru terbentuk pada Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Boalemo yang didalamnya menyangkut kewenangan urusan Komunikasi Informatika dan Urusan Statistik serta Urusan Persandian. Dengan uraian tersebut bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian masih memerlukan peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemenuhan sarana prasarana penunjang program komunikasi informatika yang memadai dalam menuju Kabupaten Boalemo yang e-government.

Pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang di dukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua SOPD.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai SOPD yang membidangi komunikasi Informasi, maka disusunlah Rencana Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Boalemo untuk kurun waktu (5) lima tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2017 s/d 2022 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional :
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repeblik Indonesia NO 86 TAHUN 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo NO 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 – 2031
5. Peraturan daerah Kabupaten Boalemo NO 4 Tahun 2012 Tentang RPJPD Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2025
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2017 – 2022;
8. Peraturan Bupati Boalemo NomorTahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Boalemo;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Sebagai pedoman arah pembangunan dibidang penyelenggaraan Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian di Kabupaten Boalemo waktu (5) lima Tahun 2017 s/d Tahun 2022.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo tahun 2017 s/d 2022 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan renstra.
2. Mewujudkan sinergitas antara unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo terhadap program dan kegiatan tahun 2017 s/d 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Boalemo tahun 2017-2022 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian renstra SOPD, fungsi Renstra SOPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra SOPD, keterkaitan renstra SOPD dengan RPJMD, renstra K/L dan renstra Kabupaten Boalemo dan dengan renja SOPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Komunikasi Informasi, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Boalemo

II.2. Sumber Daya Dinas Kominfo Kabupaten

II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

II.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

III.2. Telaahan Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas

Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra provinsi

Analisis Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo yang berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Provinsi Gorontalo terhadap sasaran Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup strategi

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

III.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV.1.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Berisi mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Boalemo dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Boalemo.

BAB VIII. P E N U T U P

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORNGANISASI DINAS KOMIFO

KABUPATEN BOALEMO

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor:Tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo berkedudukan sebagai unsur pelakasanaan otonomi Daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan dan pelaksanaan Kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika
- b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik
- c. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi daerah
- e. Pengawasan dan pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Boalemo NomorTahun 2016 Tentang uraian tugas sekretariat, bidang, Sub Bagian dan seksi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo di jabarkan sebagai berikut:

a. Uraian Tugas Kepala Dinas :

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian yang berada dibawah tanggung jawab Bupati.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. Menyusun kebijakan dan rencana strategi bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian;
 - b. Melaksanakan urusan – urusan pemerintah di bidang komunikasi informatika statistik dan persandian;
 - c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi di bidang komunikasi informatika statistik dan persandian
 - d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian;
 - e. Melaksanakan pengawasan fungsional
 - f. Melaksanakan teknis operasional bidang komunikasi informatika statistik dan persandian;
 - g. Pemantauan dan evaluasi program dibidang komunikasi informatika, statistik dan persandian;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Uraian Tugas Sekretariat :

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :
 - a) pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
 - b) pengelolaan administrasi, kepegawaian dan urusan rumah tangga;
 - c) pengelolaan umum dan keuangan;
 - d) penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
 - e) penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;

- f) pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :
- a. **Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun, menyiapkan perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Dinas;
 - b. Menghimpun, mengolah, menganalisis, merumuskan dan menyajikan data statistik Dinas;
 - c. Menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan perencanaan dan kepegawaian Dinas.
 - d. Menyusun perencanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
 - e. Mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan rencana program Dinas;
 - f. Menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - g. Melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
 - h. Mendistribusikan, memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - i. Mengkonsultasikan dan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;
 - j. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - l. Menyusun pengajuan permohonan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Kartu Asuransi Kesehatan dan Kartu Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pemensiunan, pengembangan karier dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa pegawai;
 - m. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai;

- n. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, menyusun standar kompetensi pegawai, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
- o. Mengembangkan dan mengendalikan tata pengelolaan kearsipan dan dokumen kepegawaian;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
- q. Menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dari bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
- r. Menganalisa bahan-bahan pelaporan dan melakukan penyusunan laporan bulanan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun, menyiapkan perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum dan Keuangan
- b. Menghimpun, mengolah, menganalisis, merumuskan dan menyajikan data statistik Dinas;
- c. Menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan Bagian Umum Dinas Dan Keuangan.
- d. Menyusun perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum Dan Keuangan;
- e. Mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan rencana program Dinas;
- f. Menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan;
- g. Melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
- h. Mendistribusikan, memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;

- i. Mengkonsultasikan dan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;
- j. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- l. Pengorganisasian dan pengkoordinasian tugas dibidang ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan kepegawaian;
- m. mengembangkan dan mengendalikan tata pengelolaan kearsipan dan dokumen keuangan;
- n. menginventarisir kebutuhan listrik, air, faksimili, telpon, peralatan dan perlengkapan kantor lainnya;

c. Uraian Tugas Bidang Komunikasi Dan Informatika

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, presedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, layanan hubungan dan kemitraan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten.

- 1) Bidang Komunikasi Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, layanan hubungan dan kemitraan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten;

- b. Melaksanakan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, layanan hubungan dan kemitraan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten;
- c. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, layanan hubungan dan kemitraan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten;
- d. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, layanan hubungan dan kemitraan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, layanan hubungan dan kemitraan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten;
- f. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis di bidang Penyiaran, Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Publikasi dan Sosialisasi, Pelayanan Informasi;
- g. Melaksanakan koordinasi di bidang Penyiaran, Komisi Informasi, Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Publikasi dan Sosialisasi serta Pelayanan Informasi;

- h. Menyusun standar, rekomendasi, prosedur di bidang Penyiaran, Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Publikasi dan Sosialisasi serta Pelayanan Informasi;
- i. Melaksanakan pelayanan informasi dan penyebaran informasi melalui media online, Media Center, media elektronik dan media konvensional diantaranya media cetak, media langsung, media tradisional serta Dokumentasi;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan penyelenggara pos dan pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan pembangunan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi skala wilayah Kabupaten Boalemo;
- k. Menyelenggarakan rekomendasi teknis terhadap permohonan perizinan di bidang penyiaran;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan RAPI, dan ORARI jaringan tetap *local wireline (end to end)* di Daerah Kabupaten Boalemo;
- m. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi teknis terhadap penempatan *Radio Base Station* (RBS) di daerah Kabupaten Boalemo;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan saran pertimbangan teknis jasa titipan untuk kantor cabang yang berlokasi di daerah Kabupaten Boalemo;
- o. Melaksanakan pengelolaan data usaha jasa pos dan telekomunikasi;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas Kecamatan di Kabupaten Boalemo;
- q. Merumuskan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- r. Menyusun peraturan teknis penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Boalemo;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

a. Seksi Saluran Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik;

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah dan layanan hubungan media di Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Saluran Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan layanan pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- c. Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup provinsi dan daerah Kabupaten;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
- e. Menyelenggarakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten local;
- f. Menyelenggarakan pembuatan konten local;
- g. Menyiapkan bahan dialog publik;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi secara langsung (interpersonal communication);
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta instansi/lembaga terkait guna mendapatkan bahan sajian pelayanan informasi;
- j. Menyiapkan bahan penyebarluasan informasi melalui media online dan elektronik;
- k. Melaksanakan penyajian dan fasilitas layanan data dan informasi;
- l. Melaksanakan koordinasi pengelolaan internet publik;
- m. Melaksanakan penyajian layanan data dan informasi melalui help desk;
- n. Melaksanakan pengelolaan konten website www.boalemokab.go.id;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengembangan Aplikasi;

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, serta layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK Pemerintah Daerah Kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet yang terintegrasi layanan publik dan pemerintahan di kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- b. Menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, penetapan standar format data dan informasi;
- c. Menyelenggarakan layanan recovery data dan informasi;
- d. Menyelenggarakan Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- e. Menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- f. Menyelenggarakan Layanan interoperabilitas;
- g. Menyelenggarakan Layanan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan;
- h. Menyelenggarakan Layanan Pusat Application Program Interface (API) daerah;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis serta strategi pengembangan aplikasi layanan pemerintahan, aplikasi layanan publik sesuai dengan kebijakan Daerah;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan sistem informasi, perangkat lunak serta e-business dan koordinasi pengelolaan dan pengembangan akses informasi e-business;.
- k. Melaksanakan kebijakan strategi pengembangan aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan e-business di Daerah;

- l. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan dan strategi pengembangan serta koordinasi interoperabilitas sistem informasi dan transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia antar Organisasi Perangkat Daerah;
- m. Melaksanakan analisis interoperabilitas sistem informasi, transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia antar Perangkat Daerah;
- n. Melaksanakan pendampingan pengembangan aplikasi secara efektif terhadap Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo dan publik;
- o. Melaksanakan pelayanan standarisasi aplikasi sistem informasi bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo dan publik;
- p. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sertifikasi, akreditasi, registrasi produk dan jasa aplikasi sistem informasi perangkat daerah;
- q. Melaksanakan koordinasi implementasi interoperabilitas aplikasi dan website e-Government skala Kabupaten dalam rangka integrasi data antar Kecamatan serta Pemerintah Daerah;
- r. Melaksanakan pengelolaan metadata untuk penyusunan bahan dan pengelolaan basis data terintegrasi;
- s. Melaksanakan pengelolaan server, web hosting dan colocation server pada data center Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- t. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
- u. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
- v. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pengendalian infrastruktur jaringan yang terdiri perangkat data centre, perangkat jaringan komunikasi data, bandwidth bagi organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- w. Menyelenggarakan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah Kabupaten Boalemo, Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kecamatan, Layanan peningkatan

- kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, Menetapkan dan mengubah nama Pejabat Domain, Menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain;
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

d. Uraian tugas Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik Dan Persandian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dan fasilitasi pos dan telekomunikasi serta pelaporan data dan informasi statistik sektoral lingkup kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyiapan perumusan data dan informasi statistik sektoral lingkup kabupaten;
- b. melaksanakan kebijakan rumusan data dan informasi statistik sektoral lingkup kabupaten;
- c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria rumusan data dan informasi statistik sektoral lingkup kabupaten;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perumusan data dan informasi statistik sektoral lingkup kabupaten;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan data dan informasi statistik sektoral lingkup kabupaten;
- f. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Statistik dan Persandian;
- g. pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan sinkronisasi data dengan instansi terkait untuk keperluan validasi data;
- h. pelaksanaan pengolahan, analisis dan pemutakhiran data;
- i. pelaksanaan publikasi data dan statistik;

- j. Melaksanakan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral dengan mengedepankan prinsip good governance;
- k. Merumuskan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten;
- l. Menyusun peraturan teknis tata kelola, peraturan teknis operasional, serta peraturan teknis pengawasan dan evaluasi persandian untuk pengamanan informasi dan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten;
- m. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah Kabupaten;
- n. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- o. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan /atau seminar;
- p. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan /atau seminar;
- q. Pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan, perbaikan dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- r. Koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan antar Kecamatan di lingkungan Kabupaten;
- s. Penyusunan instrumen dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- t. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari :

a. Seksi Statistik dan Integrasi Data;

Seksi Statistik dan Integrasi data mempunyai tugas Menyelenggarakan serta mengintegrasikan Data hasil Statistik sektoral untuk kebutuhan publik dan intern dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah di Kabupaten Boalemo.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Statistik dan Integrasi Data mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi pengumpulan dan sinkronisasi data dengan instansi terkait untuk keperluan validasi data;
- b. melaksanakan publikasi data dan statistik;
- c. Melaksanakan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral dengan mengedepankan prinsip good governance;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan data dan informasi statistik sektoral lingkup kabupaten;
- e. Melakukan pengintegrasian pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik;
- f. Melakukan penggabungan atau menyatukan data yang berasal dari instansi pemerintah dalam rangka mendukung manajemen informasi data di Kabupaten Boalemo;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;

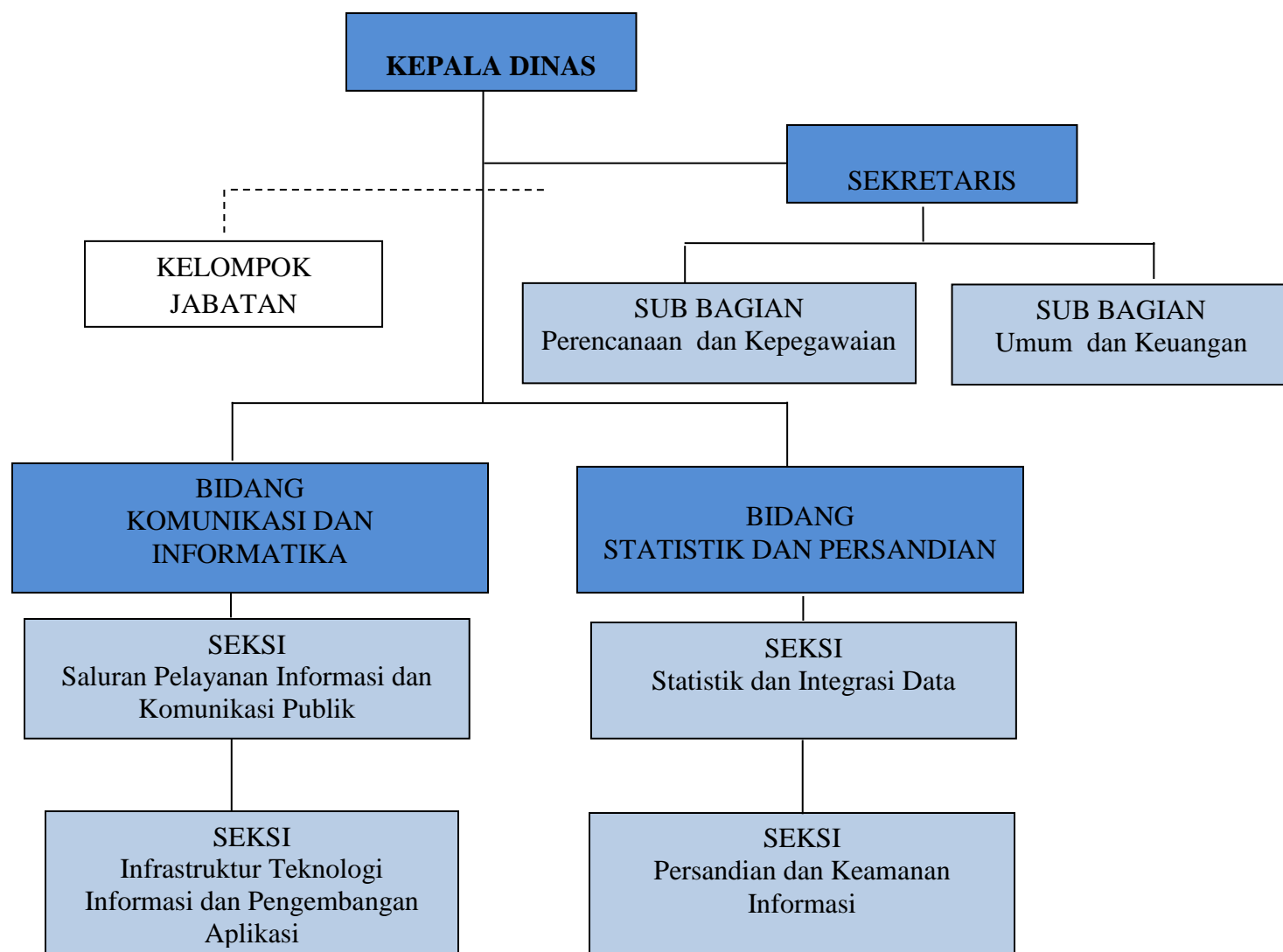
Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi persandian untuk pengamanan Info Pemda serta pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten;
- b. Menyusun peraturan teknis tata kelola, peraturan teknis operasional, serta peraturan teknis pengawasan dan evaluasi persandian untuk pengamanan informasi dan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten;
- c. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah Kabupaten;

- d. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- e. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan /atau seminar;
- f. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan /atau seminar;
- g. Pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan, perbaikan dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- h. Koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan antar Kecamatan di lingkungan Kabupaten;
- i. Pengamanan informasi elektronik;
- j. Penyusunan instrumen dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- k. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BOALEMO**



II.2. SUMBER DAYA DINAS KOMINFO KABUPATEN BOALEMO

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo sebanyak 30 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian :

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH	PRESENTASE
1	CPNS	0 orang	0%
2	PNS	23 orang	79%
3	HONORER	7 orang	21%
	JUMLAH	30 orang	100%

b. Komposisi Jabatan PNS

NO	JABATAN PNS	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Jabatan Struktural	10 orang	43,48%
2.	Jabatan Fungsional tertentu	0 orang	0 %
3.	Jabatan Fungsional Umum	13 orang	56,62 %
	Jumlah	23 orang	100 %

c. Komposisi Eselon PNS :

NO	ESELON PNS	JUMLAH	PRESENTASE
1	Eselon II	1 orang	4,35 %
2	Eselon III	3 orang	13,04%
3	Eselon IV	6 orang	26,09%
4	Staf	13 orang	56,52 %
	Jumlah	23 orang	100%

d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang Tahun 2017

N O	URAIAN	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					GRAND TOTAL
		a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	
1	Kepala Dinas																		1		1	1
2	Sekretariat						2	3	1		6	2		1		3	1				1	1
3	Bidang Komunikasi informatika						1	2			3	1		2		3	1				1	7
4	Bidang Statistik dan persandian							1			1	1		1	2	4						5
	Jumlah					0					10					10					3	23

e. Komposisi Pendidikan PNS :

NO	PENDIDIKAN PNS	JUMLAH	PRESENTASE
1	SD	0 Orang	0 %
2	SLTP	0 orang	0 %
3	SMA	9 orang	39,13 %
4	D III	1 orang	4,35%
5	S 1	12 orang	52,17%
6	S 2	1 orang	4,35%
	JUMLAH	23 orang	100%

f. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :

NO	PENDIDIKAN PEGAWAI TIDAK TETAP	JUMLAH	PRESENTASE
1	SLTA	3	42,86 %
2	D III	0	0 %
3	S 1	4	57,14%
	JUMLAH	7	100%

g. Data pegawai menurut Gender :

NO	Pegawai Menurut Gender	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	16	53,33%
2	Perempuan	14	46,67%
	Jumlah	30	100

2.2.1 Sarana dan Prasarana

TABEL 2.2.1
JUMLAH ASSET DINAS KOMINIKASI INFORMATIKA STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN BOALEMO

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	1	Paket	Media Center
2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	2	Unit	AC, TV,
3	Alat Studio dan Komunikasi	1	Paket	Komputer, Laptop,Camera, Handycam
4	Bangunan Gedung	1	Gedung	Media Center
5	Jaringan Internet	2	Paket	FO Media Center, FO Kantor Kominfo
6	Buku dan Perpustakaan	3	Paket	Buku Boalemo Dalam Angka, Kecamatan Dalam angka Dan PDRB
7	Alat Kendaraan Dan Trasnportasi	2	Paket	Mobil Operasional (1 Unit) ,Kendaraan Ruda Dua (2 Unit)
8	Alat percetakan	8	Unit	Printer

TABEL 2.2.2
JUMLAH PERANGKAT KERAS KOMPUTER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BOALEMO

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Ket.
1	2	3	4	5
1	PC Penunjang Kantor	6	Unit	
2	Laptop	10	Unit	
3	PC Penunjang Media Center	8	Unit	

II.3.KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kinerja Pelayanan Dinas Kominfonikasi Informatika Statistik Dan Persandian meliputi :

a. **MEDIA CENTER**

merupakan pusat informasi bagi masyarakat berbasis TIK dalam rangka memberdayakan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat. Fasilitas ini disediakan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan gratis. Media Center merupakan tempat dilaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan,juga pertemuan-pertemuan warga. Selain itu Media Center dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan dukungan media dan teknologi untuk memudahkan survei pasar, pemasaran dan transaksi. Dengan Media Center, masyarakat dapat melakukan banyak kegiatan komunikasi mencari informasi, berkomunikasi dengan pihak lain, dan mendapatkan layanan sosial dan ekonomi. Semuanya dilakukan dengan dukungan TIK, misalnya melalui telepon, komputer dan sambungan internet. Selain itu Media Center dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan dukungan media dan teknologi untuk memudahkan survey pasar, pemasaran dan transaksi;

b. PENERAPAN TATA KELOLA TIK

Dalam hal ini Pemeringkatan e-Gov merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara yang tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK dilingkungan pemerintah
2. Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif.
3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah Kabupaten Boalemo pada khususnya dan secara nasional pada umumnya.
4. Mengoptimalkan penggunaan dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur TIK.
5. Teridentifikasinya pengembangan Infrastruktur TIK guna mendukung RPJMD Kab Boalemo 2018-2022.
6. Teridentifikasinya rencana pengembangan sumber Daya Manusia guna mendukung pengembangan Infrastruktur TIK secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan keamanan dan kehandalan dari keakrutan data dan informasi.
8. Merupakan titik dasar dalam kebijakan dan strategi pengembangan e-Gov

c. SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE)

Dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronis dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan system informasi.

d. FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING (DATA CENTER)

Merupakan pelayanan teknis kepada Seluruh SOPD Kabupaten Boalemo dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik;

e. **KEAMANAN INFORMASI**

Untuk pengembangan evaluasi sistem aplikasi yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mengamankan sistem dan data dari : virus, Hacker, Penyadapan Informasi dan sejenisnya sesuai standar SNI

f. **INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK**

Merupakan layanan fasilitasi yang terkoneksi antar SOPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-goverment dan layanan publik;

g. **JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI**

Jasa POS Merupakan kegiatan pelayanan izin penyelenggaraan jasa titipan, pembinaan, pengawasan, penerbitan rekomendasi bidang pos dalam kelengkapan data administrasi diwilayah tertentu.

Telekomunikasi merupakan bagian pelaksanaan daerah yaitu memberikan lokasi – lokasi tertentu yang telah koordinat oleh daerah terhadap provaiders dalam pembangunan menara telekomunikasi (Cell Pland)

h. **PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)**

Merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk penyebaran informasi dengan cara mendorong partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan. Dengan meningkatkan nilai tambah kualitas media massa kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi untuk menuju masyarakat informasi.

i. **MEDIA PERTUNJUKAN RAKYAT (PERTURA)**

Merupakan salah satu bentuk wahana peyampaian informasi/ Pesan dari komunikator terhadap komunikan. Guna peningkatan kecerdasan masyarakat dalam bidang iptek dan pembangunan. Media tersebut berupa : Pemutaran Film Dokumenter, Pertunjukan kegiatan interpersonal budaya, kesenian, permainan rakyat dan

kompetisi perlombaan yang komunikatif yang mampu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat

1. **MEDIA ON-LINE**

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs www.boalemokab.go.id dan email.kominfoboalemo@gmail.com

2. **BULETIN “DAMAI-KU”**

merupakan salah satu media penyebarluasan informasi bagi masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam bentuk penerbitan Buletin. Khalayak sasarannya SOPD, Kecamatan se Kabupaten Boalemo serta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kabupaten Boalemo.

3. **AJANG WADUL**

Merupakan salah satu program unggulan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan masyarakat secara interaktif. Program Ajang Wadul yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boalemo bekerjasama dengan GO-TV. Program ini dinilai tepat sasaran dalam era keterbukaan informasi publik dan mampu berkiprah banyak serta lebih memberi manfaat bagi masyarakat luas;

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Kabupaten Boalemo

No .	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKU	Target Rentra SOPD 5 Tahun sebelumnya					Realisasi Capaian Tahun ke.					RAsio Capaian Pada Tahun ke				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase Penyebaran Informasi Publik yang disediakan untuk masyarakat								32	48	62	70	95	32	48	62	70	95
2	Presentase Tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagai pelaksanaan diseminasi informasi								20	25	35	45	55	20	25	35	45	55
3	Presentase Keaktifan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)								8	18	45	71	80	8	18	45	71	80
4	Presentase Infrastruktur yang terbangun untuk pelayanan								1	2	2	2	2	1	2	2	2	2

	publik																	
5	Presentase ketersediaan website pada unit kerja								100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Presentase pemanfaatan hosting dan collocation								20	28	28	31	37	25	30	30	35	40
7	Presentase unit kerja Kabupaten Boalemo yang membentuk PPID								10	10	10			10	10	10		

Tilamuta, Desember 2017

Kepala Dinas Kominiaksi Informatika Statistik Dan Persandian
Kabupaten Boalemo

Ir.Mans Mopangga

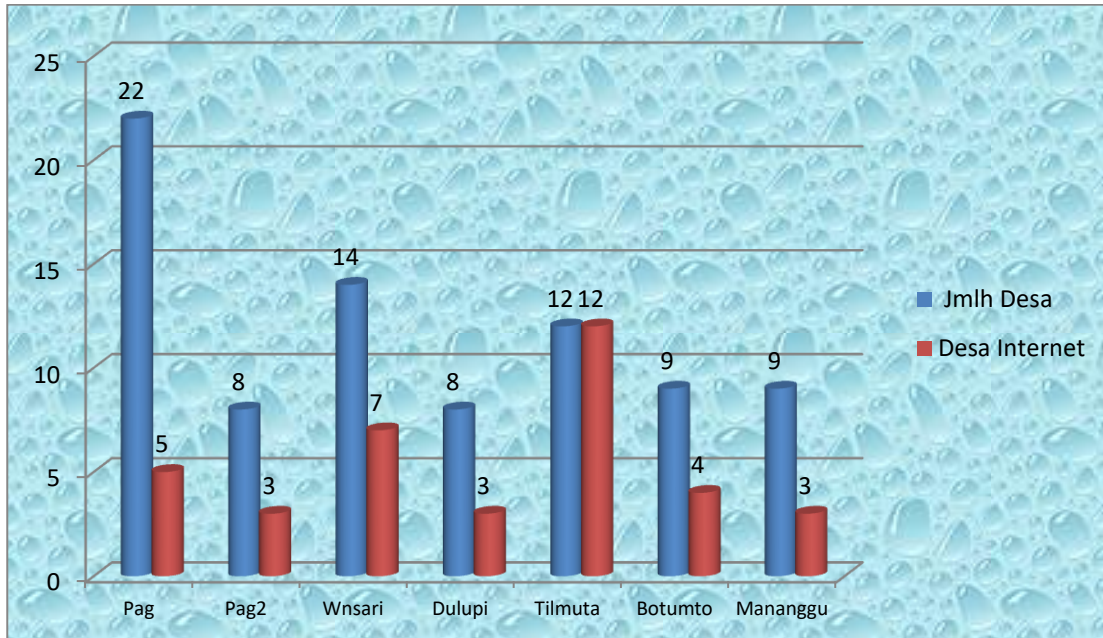
NIP. 19650418 200005 1 001

Tabel 2.3.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Boalemo

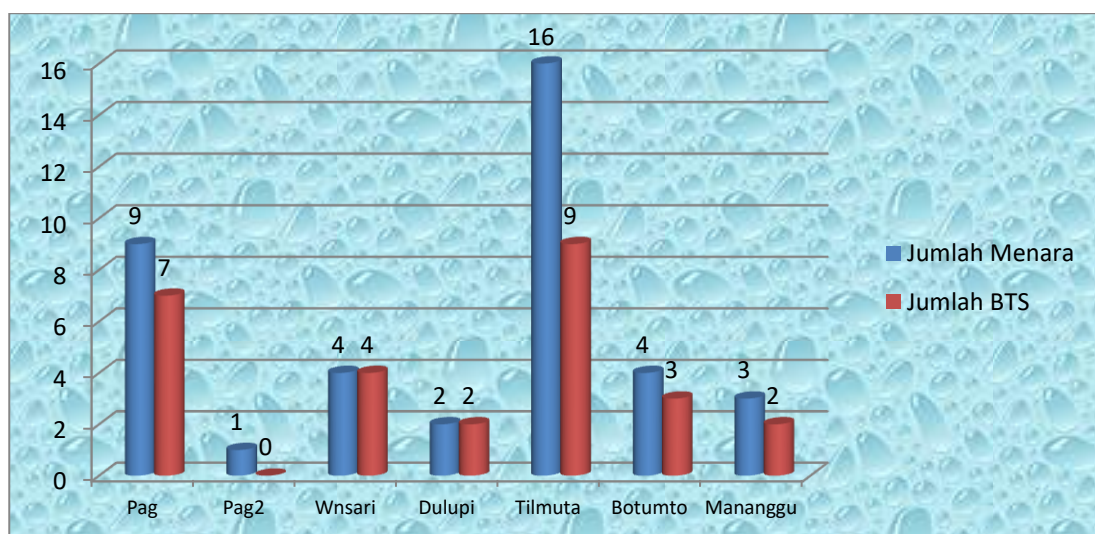
Uraian	Anggaran Pada Tahun ke						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	%	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	1.075.762.253	1.085.015.000					1.037.201.736	96,42%					
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	539.645.747	455.100.000					486.870.769	90,22%					
Program Pengkajian Dan penelitian Bidang Informasi Dan komunikasi	178.200.000	265.885.000					176.531.900	99,06%					
Program Pengembangan Data / Informasi/Statistik Daerah	129.000.000	194.000.000					128.813.700	99,85%					

GRAFIK 2.3.1
JUMLAH JARINGAN INTERNET per KECAMATAN
DI KABUPATEN BOALEMO



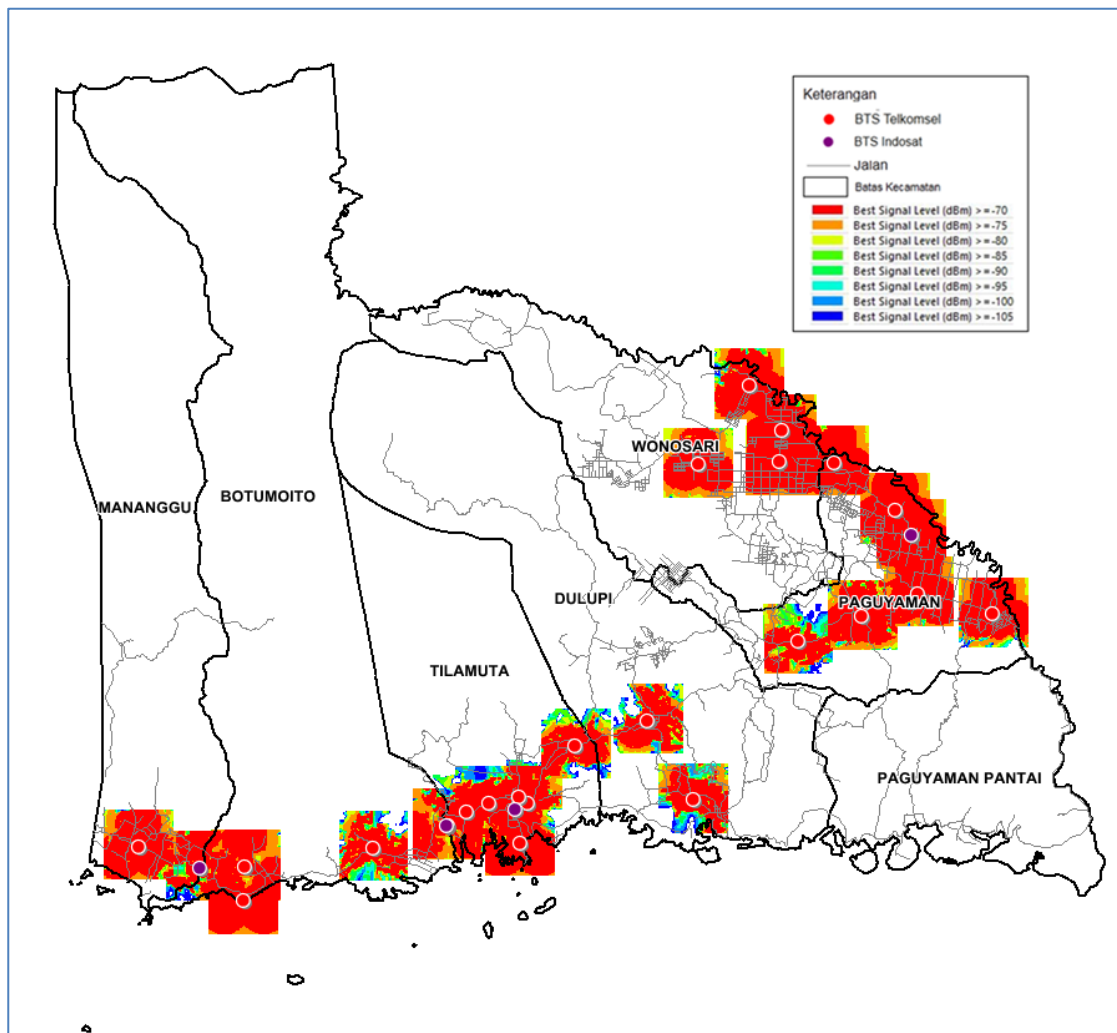
Terlihat bahwa Kecamatan Tilamuta sebagai pusat Kota Kabupaten Boalemo yang sudah terpenuhi cakupan akses internet sampai ke desa

GRAFIK 2.3.2
JUMLAH MENARA DAN BTS Per KECAMATAN
DI KABUPATEN BOALEMO



Terlihat bahwa dari 39 Menara di Kabupaten Boalemo baru 27 yang sudah BTS. Dan untuk Kecamatan Paguyaman Pantai yang perlu adanya perhatian khusus dalam jaringan telekomunikasi. Sehingga pemerataan dan keadilan dalam pengembangan Informasi dan komunikasi tersebar secara merata di Tujuh Kecamatan.

Gambar : Area cakupan layanan BTS Eksisting



Jangkauan Layanan BTS Eksisting

Analisa Cakupan Layanan

Dengan menggunakan software radio network planning Atoll, dapat diperoleh cakupan layanan dari setiap BTS. Software ini bekerja dengan menggunakan digital map dan model propogasi selular ITU-R 1546. Dari 27 BTS eksisting yang berada pada 30 lokasi zona menara eksisting, baru melayani area seluas $\pm 25\%$ dari luas Kabupaten Boalemo.

Dari gambar di atas dapat diperoleh informasi bahwa beberapa kecamatan dengan persentase yang besar mendapatkan cakupan layanan BTS, namun masih ada beberapa kecamatan yang belum mendapatkan cakupan layanan BTS yakni kecamatan Paguyaman Pantai.

Di bawah ini adalah tabel rincian area cakupan layanan BTS-BTS yang disajikan per kecamatan.

Tabel Error! No text of specified style in document. Cakupan layanan per kecamatan

No	Kecamatan	Persentase Cakupan Layanan
1	Paguyaman	35%
2	Paguyaman Pantai	0%
3	Wonosari	25%
4	Dulupi	15%
5	Tilamuta	35%
6	Botumoito	15%
7	Mananggu	15%

II.4.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian dalam 5 tahun Ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di kabupaten Boalemo, Sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Komunikasi Informatika statistik dan Persandian sebagai pusat data center di Kabupaten Boalemo tentu saja perlu dorongan good will dari pimpinan dan stake holder lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan Sumber Daya Manusia yang mampuni dapat mengaplikasikan TIK tersebut.

Beberapa tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan TIK yaitu :

II.4.1 Tantangan :

1. Globalisasi Informasi yang berdampak pada Keterbukaan Informasi Publik

2. Kesenjangan Informasi di masyarakat.
3. Pesatnya perkembangan TIK
4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum optimal
5. Kurangnya Bimtek SDM aparatut TIK
6. Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang beragam
7. Implementasi masterplan pemetaan jaringan Infrastruktur yang belum rampung.

II.4.2 Peluang :

1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang Kominfo
2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk di daya gunakan
3. Program peningkatan kualitas pelayanan public
4. Program pengembangan muatan e-govemment
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
6. Program pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan
7. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang kominfo

Tabel 2.4

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Komunikasi Informatika

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra SKPD	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4
1	Presentase Penyebaran Informasi publik yang disediakan untuk masyarakat	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan public	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2	Presentase Peningkatan KIM Yang Aktif	Pembentukan dan pembinaan KIM seluruh desa dikabupaten Boalemo	Pelaksanaan Pekan KIM
3	Presentase Pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi) di seluruh SOPD	Pembentukan dan pengembangan PPID	Terciptanya budaya pelayan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi Informatika yang terintegrasi, bersih, efektif dan efisiensi
4.	Presentase Pengaduan Masyarakat	Tersedianya aplikasi sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N – Lapor)	Tersedianya akses Broadband nasional, internet, penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan
5.	Presentase E- Government di seluruh SOPD	Terselenggaranya e-Government dan Comont center	Terselenggaranya tata kelola Komunikasi Informatika yang efisiensi, berdaya saing dan aman
6.	Indeks Kepuasan Informasi Website	Meningkatnya pelayanan dan penyelenggaraan penyediaan informasi publik	Keterbukaan Informasi Publik

Bab III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui TIK pada 5(lima) Tahun ke depan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat akan pentingnya informasi.

Inforamsi melalui TIK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam memenuhi hajat hidup sehingga perlu di bangun kedepan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK merupakan issue strategis pada (lima) tahun kedepan.

III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan professional
2. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database SOPD
3. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
4. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK.

Tabel 3.1.2
Identifikasi Permasalahan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SOPD
			Internal (Kewenangan Dinas Komunikasi)	Eksternal (Diluar kewenangan Dinas Kominfo)	
1	2	3	4	5	6
Jumlah media informasi yang bermanfaat bagi masyarakat	Terdapat 6 Jenis Media Informasi yang disebar	Perbup tentang Media informasi yang dibisa digunakan di Daerah	Keterbatasan sumber daya Manusia dalam pengeolaan Media Informasi	Belum adanya Kerja sama yang dengan Media Informasi	Belum Optimalnya Penyebarluasan media informasi
Presentase Peningkatan KIM Yang Aktif	Tujuh (7) KIM yang aktif	Perbup tentang pembentukan KIM	Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan penyegaran KIM	Masyarakat belum terlalu memahami peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan Program KIM	Belum Optimalnya peran KIM di Daerah
Presentase Pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi) di seluruh SOPD	Belum terbentuk PPID	Surat Keputusan Bupati Tentang Tiem Pembentukan PPID	Belum adanya literatur dalam penyusunan PPID	kerja sama dengan SOPd terkait masih lemah	Belum adanya Tiem PPID Kabupaten yang dinyatakan pada SK bupati
Presentase Pengaduan Masyarakat	Pengaduan sejumlah yang terselesaikan	Surat Keputusan Bupati	Koordinasi Lintas yang belum maksimal	Masih Minimnya anggaran dalam menganggarkan Aplikasi Pengaduan Masyarakat	Belum teranggarkan aplikasi pengaduan masyarakat
Presentase E-Goverment di seluruh SOPD	Belum terbentuknya E-Government di Kabupaten	Adanya Pembangunan Data Center yang terintegrasi	Masih terbentuknya Dinas Kominfo sehingga SDM, Anggaran belum bisa mendukung	Belum adanya Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Program dan kegiatan pada Dinas Kominfo	Belum terbangunnya e-Government

Indeks Kepuasan Informasi Website	Website Dinas kominfo baru diadadakan pada bulan desember 2017	Kunjungan masyarakat yang puas terhadap informasi Website	Baru berdirinya Dinas Kominfo sehingga tahun 2017 baru mengadakan Website		
--	--	---	---	--	--

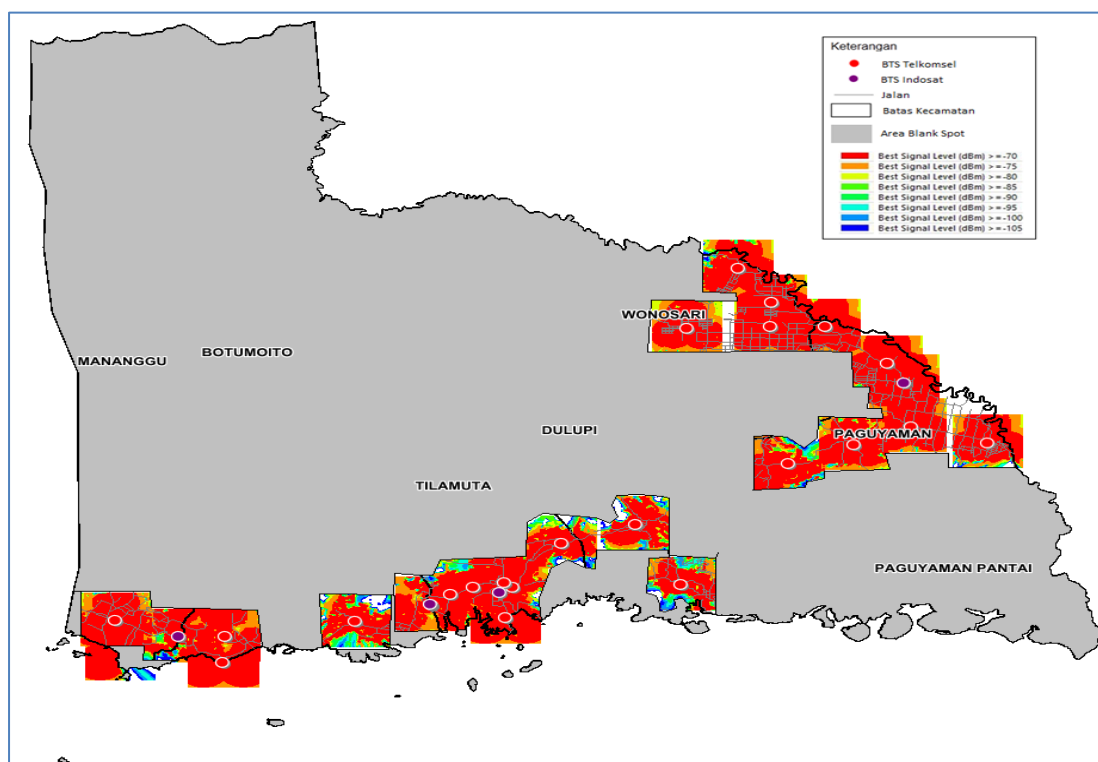
Selain mengidentifikasi Permasalahan faktor eksternal dan internal pada pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian maka juga perlu menganalisa cakupan pelayanan BTS eksisting. Beberapa kawasan yang belum terlayani dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.3

Persentase area yang belum terlayani BTS Eksisting per Kecamatan

No	Kecamatan	Persentase Cakupan Layanan	Persentase Area yang Belum Terlayani
1	Paguyaman	35%	65%
2	Paguyaman Pantai	0%	100%
3	Wonosari	25%	75%
4	Dulupi	15%	85%
5	Tilamuta	35%	65%
6	Botumoito	15%	85%
7	Mananggu	15%	85%

Gambar 3.1.4 Area yang belum terlayani BTS Eksisting



Gambar area/border berwarna abu-abu di bawah ini menunjukkan area yang belum terlayani di Kabupaten Boalemo.

Analisa Kawasan yang Sudah Terlayani Namun Perlu Penambahan Kapasitas

Penambahan kapasitas diperlukan ketika jumlah populasi pengguna selular semakin bertambah dan ketika pelanggan tidak bertambah namun variasi layanan selular semakin bertambah. Penggunaan smartphone sebagai handset bagi pengguna selular di kawasan perkotaan, ikut memberikan kontribusi peningkatan kapasitas trafik. Konsekuensinya adalah Telco operator perlu melakukan splitting cell. Yang semula hanya ada satu menara, maka perlu menambah menara baru dan meletakkan perangkat BTS yang baru.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo tahun 2015, Kecamatan Paguyaman Kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 33,598 jiwa. Apabila diasumsikan 80% dari penduduk di Kecamatan tersebut adalah pengguna smartphone dengan layanan 3G maka adanya 9 BTS di kecamatan tersebut sudah tidak mampu lagi melayani secara optimal.

Dari 39 menara eksisting yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Boalemo dapat dikelompokkan dalam lingkaran imajiner radius 400 meter sebanyak 30 Zona eksisting.

III.2 TELAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 s/d Tahun 2022 sebagaimana yang diuraikan pada Bab V Halaman V-1 diuraikan secara jelas bahwa Visi dan Misi Pemerintah Daerah sebagai Berikut :

Visi “Kabupaten Boalemo Yang Damai, Cerdas, Sejahtera Dalam Suasana Yang Religius Tahun 2022”

Penjelasan dari visi ini diuraikan sebagai berikut :

Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai :

Mengandung arti bahwa suatu upaya pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kedamaian melalui peningkatan kedamaian merupakan salah satu tugas dari pemerintah daerah. Dengan terciptanya kedamaian maka dapat dipastikan akan terwujudnya pemerintahan yang clean and

clear. Perwujudan Kedamaian dapat ditempuh melalui aspek peningkatan aspek keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan sosial masyarakat, Peningkatan suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan, serta peningkatan kenyamanan atas layanan kebutuhan dasar masyarakat.

Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Cerdas :

Yaitu suatu upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia agar menjadi manusia berilmu pengetahuan, menguasai teknologi dan informasi, sehat jasmani dengan dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera

Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera :

Artinya suatu upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya teknologi (buatan) guna memenuhi kebutuhan masyarakat Boalemo secara lahir dan batin. Dalam konteks ini, pemerintah daerah melakukan pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang merata, dan peningkatan iklim investasi yang kondusif.

Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Religius :

Artinya suatu upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai religiusitas, meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi seluruh pemeluk agama, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam praktek pemerintahan

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SOPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : “Kabupaten Boalemo Yang Damai, Cerdas, Sejahtera Dalam Suasana Yang Religius Tahun 2022”				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan Pelayanan SOPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Misi 1 :				
Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai				
Focus Program 2 :				
	Berusaha memberi rasa keadilan kepada seluruh kelompok dan profesi masyarakat dalam hal keadilan dalam penyebaran Informasi komunikasi Publik	-Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara desa dan kota. -Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat -Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik -Belum adanya rencana induk tata kelola TIK	-Terbatasnya sumberdaya manusia yang tampil dan profesional -Kurangny kemampuan mengintegrasikan sistem sistem informasi dan database SOPD -Kurangny kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat -Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK -Belum ada aturan baku yang mengatur urusan bidang komunikasi dan informatika seperti website, hosting dan colaction dll -Belum optimalnya layanan penyelenggaraan pos dan	-Kepedulian pimpinan terhadap bidang Kominfo -Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan -Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik -Kebutuhan pengembangan muatan e-Government -Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik

III.3. TELAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI.

Salah satu hal yang menjadi rujukan dalam penentuan isu – isu strategis adalah kajian terhadap Rencana Strategis Kementerian. Dalam hal ini adalah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo serta Renstra Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo

Adapun telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Persandian Kabupaten Boalemo Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kominfo RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kominfo RI	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	Masih tingginya kesenjangan digital diwilayah Kabupaten Boalemo	Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional	Peningkatan Sumberdaya manusia yang andal da terampil serta ketersediaan sarana prasarana layanan kualitas komunikasi dan informatika
2	Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan	Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi serta belum terjangkau jaringan infrastruktur	Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan Database SKPD serta Kurangnya	Data dan informasi sebagian SOPD sudah tersedia serta kemampuan Dinas Kominfo untuk

	keamanan	broandband secara merata	kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat	membangun infrastruktur jaringan yang optimal
3	Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing dan aman	Terbatasnya sarana dan prasarana telekomunikasi dan penyiaran	Minimnya anggaran pendukung dalam membangun infrastruktur Jaringan Komunikasi Informatika	dari Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk mewujudkan Masyarakat Yang Damai, Cerdas, Sejahtera Dalam Suasana Yang Religius.
4	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegrasi, bersih, efektif dan efesensi	Belum menyuluruhnya Implementasi Revolusi Mental dan Revolusi birokrasi	Masih rendahnya koordinasi terhadap beberapa lembaga non pemerintah sebagai salah satu sumber informasi.	Partisipasi Publik dalam hal kebijakan dan anggaran

Adapun telaahan terhadap Renstra Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Boalemo Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Gorontalo beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Gorontalo	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan infrastruktur pendukung penyelenggaraan komunikasi, informatika, statistik, persandian dan mewujudkan pelayanan	Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi soisal dan	Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional serta	Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan

	publik yang berkualitas melalui pengembangan aplikasi dan sistem layanan publik secara elektronik;	teknologi informasi (digital device) di masyarakat	kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan Database SKPD	Serta rancangan Pengembangan muatan e-Government
2.	Meningkatnya Kualitas penyediaan dan penyebaran informasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat	Kurangnya sosialisasi media online sebagai salah satu sumber/media berita yang mudah dijangkau/diakses.	Pemerintah Kabupaten Boalemo terus mengembangkan Media Center dan Website yang bisa diakses oleh masyarakat

III.4. TELAHAN RENSTRA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI

Adapun telaahan Renstra terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4..1
Telaahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Boalemo
Terhadap RTRW Kabupaten Boalemo beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

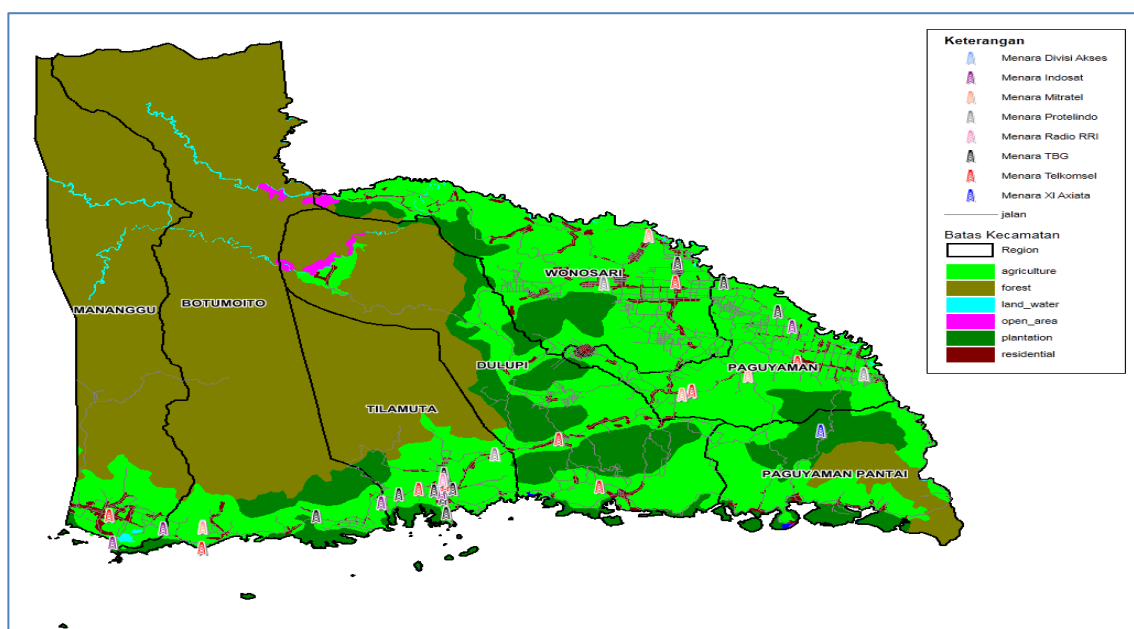
No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Dengan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Wilayah melalui pengembangan Sistem jaringan Telekomunikasi baik jaringan kabel maupun jaringan nirkabel	Belum terbangunnya pola jalan jaringan kabel telepon	Masyarakat lebih memilih menggunakan telepon genggam	Adanya Jalan Jaringan Kabel telepon pada jalan trans Boalemo
		Belum terbangunnya sistem jaringan nirkabel berupa lokasi menara BTS di daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi	Jumlah penduduk sebagai pemakai Jaringan Telekomunikasi belum mencapai target yang ditentukan oleh	Adanya dukungan masyarakat melalui penyediaan lokasi pembangunan serta dukungan peraturan daerah

	penyedia	tentang pembangunan menara BTS
	Akses internet yang belum merata sampai ke pelosok desa	Belum adanya Master Plan pengembangan jaringan internet kabupaten Boalemo
		Adanya dukungan Dana Desa dan kecamatan untuk biaya Bandwith

Tinjauan dari Pola Ruang RTRW pada Ceel Plan Menara Telekomunikasi

Jika dioverlay dengan peta pola ruang RTRW Kabupaten Boalemo terlihat bahwa menara eksisting tersebar dengan menempati kawasan pemukiman padat penduduk, pemukiman dengan kepadatan sedang dan pemukiman dengan kepadatan rendah yang berada di sepanjang jalan. Tersebar juga di area perkebunan rakyat, tidak ada yang menempati lahan kawasan hutan.

Gambar 3.4.2 Persebaran Menara Eksisting dioverlay dengan Pola Ruang



III.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGI

Tabel 3.5.1
Identifikasi Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cloud Computing dalam Sistem Teknologi Informasi	Menuju era digitalisasi broadband dari sistem analog	Implementasi e-Government di Kabupaten Boalemo belum optimal	
2		Keterbukaan Informasi	Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi	
3		Masalah Keamanan Informasi	Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi	

Adapun Isu-isu strategis yang dihadapi pada rentang waktu 2017-2022 antara lain :

1. Implementasi E-Government

Implementasi E-Government yang mulai berkembang di Kabupaten Boalemo dalam lima tahun terakhir dinilai belum optimal, namun secara substantive masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu di dorong terus agar implementasi e-government semakin mengarah pada substansi yang semestinya hususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

2. Tuntutan Publik akan keterbukaan Informasi dan transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya, dengan diberlakukannya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan public untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarlausan Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (source), Saluran (Channel) dan

penerima (receiver) Informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma menyampaikan informasi yang top-down tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampiakan dan mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampian informasi yang Bottom-up adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini.

Paradigma baru komunikasi sosial ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus diberdayakan agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan (empowering) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan mengimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi sosial yang tersebar di masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tahun 2017-2022, maka di rumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Setiap tahunnya.

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo tahun 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan ,kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi public.
2. Meningkatkan layanan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi.

Sedangkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan dan penyebaran Informasi serta keterbukaan Informasi Publik
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika
3. Meningkatnya pelayanan dan penyelenggaraan penyediaan informasi publik

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian beserta indikator Kinerjanya disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.1.1

**Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya Pelayanan dan Penyebaran informasi serta keterbukaan informasi publik	Presentase Penyebaran Informasi publik yang disediakan untuk masyarakat	10%	30%	35%	50%	75%	85%
			Presentase Peningkatan KIM Yang Aktif	10%	20%	35%	50%	70%	75%
			Presentase Pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi) di seluruh SOPD	0%	30%	40%	60%	85%	95%
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Presentase Pengaduan Masyarakat	0%	0%	20%	30%	50%	70%
			Presentase Peningkatan keterjangkauan akses Internet sampai diseluruh desa	10%	20%	25%	30%	35%	55%
			Indeks Kepuasan Informasi Website	Belum terlaksana	Cukup Puas	Cukup Puas	Puas	Puas	Sangat Puas
		Meningkatnya pelayanan dan penyelenggaraan penyediaan informasi publik	Presentase Peningkatan Pengunjung Media center	0%	45%	55%	75%	80%	90%

Target kinerja yang hendak dicapai mulai tahun 2017 s/d 2022 terkait sasaran satu dari tujuan satu adalah Presentase Penyebaran Informasi publik yang disediakan untuk masyarakat dan Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditargetkan sebesar 95%. Sasaran dua adalah Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika dan Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik yang ditargetkan 100 org s/d 850 orang.

Sedangkan target kinerja yang hendak dicapai mulai tahun 2017 s/d 2022 terkait sasaran satu dari tujuan dua adalah persentase layanan aplikasi e-Government, akses internet dan layanan publik yang ditargetkan sebesar 70% s/d 90%. Sedangkan sasaran dua adalah Persentase pengunjung media center yang ditargetkan 60 org s/d 350orang.

Dalam mencapai Indikator Sasaran perlu juga memperhatikan target yang telah ditentukan, maka perlu diuraikan secara jelas formulasi perhitungan dalam mencapai indikator sasaran dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.2

Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran
Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kab Boalemo

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	KET
1.	Meningkatnya Pelayanan dan Penyebaran informasi serta keterbukaan informasi publik	Presentase Penyebaran Informasi publik yang disediakan untuk masyarakat	Jumlah Berita dan Informasi Pembangunan Daerah yang tersebarluaskan melalui media massa	X 100%
			Jumlah Berita dan Informasi Pembangunan Daerah	
		Presentase Peningkatan KIM Yang Aktif	Jumlah KIM yang Akif	X 100%
			Jumlah KIM	
		Presentase Pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi) di seluruh SOPD	Jumlah SOPD yang memiliki PPID	X 100%
			Jumlah SOPD	
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan	Presentase Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan Masyarakat pada aplikasi SP4N – Lapor yang tindak lanjuti	X 100%
			Jumlah Pengaduan Masyarakat pada aplikasi SP4N Lapor	
		Presentase Peningkatan	Jumlah desa yang sudah memiliki Akses Internet	

	komunikasi dan informatika	keterjangkauan akses Internet sampai diseluruh desa	Jumlah Desa	X 100%
		Indeks Kepuasan Informasi Website	Jumlah Pengunjung Website yang tidak puas, Puas, Cukup Puas dan Sangat Puas terhadap informasi yang disediakan	
3.	Meningkatnya pelayanan dan penyelenggaraan penyediaan informasi publik	Presentase Peningkatan Pengunjung Media center	Jumlah Penduduk yang mengunjungi Media Center	X 100%
			Jumlah Penduduk	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Boalemo tahun 2017 – 2022 Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, maka dilakukan berlandaskan 4 (empat) strategi sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan dan Penyebaran informasi serta keterbukaan informasi public.
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika.
3. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan public.
4. Meningkatnya pelayanan dan penyelenggaraan penyediaan informasi publik.

Dari ke empat strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya.
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan mengklasifikasi dan melakukan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor internal			
No	Kekuatan (Strength)	No	Kelemahan (weakness)
1	Tersedianya sumber daya manusia yang cukup	1	Terbatasnya sumber daya manusia yang tampil dan proposional
2	Tersedianya anggaran	2	Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database SKPD
3	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	3	Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
4	Tersedianya tupoksi yang mendukung penyebarluasan informasi, pengembangan TIK, pos dan telekomunikasi	4	Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
Faktor eksternal			
No	Peluang (Opportunities)	No	Ancaman (Threats)
1	Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo	1	Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2	Tersedianya media Informasi dan komunikasi untuk didayagunakan	2	Kesenajangan informasi di masyarakat
3	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan public	3	Pesatnya perkembangan TIK
4	Kebutuhan pengembangan muatan e-government	4	Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata
5	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	5	Terbatasnya pemahaman aparaturn dan masyarakat terhadap TIK
6	Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan	6	Bentuk kelembangaan Kominfo di daerah yang beragam
7	Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang kominfo		

Tabel 5.1.1
Penentuan Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran
Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Kabupaten Boalemo

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo 2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan 3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan public 4. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government 5. Kesadran masyarakat akan pentingnya informasi 6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah 7. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang kominfo 	<p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 2. Kesenjangan informasi di masyarakat 3. Pesatnya perkembangan TIK 4. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata 5. Terbatasnya pemaahaman aparatur dan masyarakat terhadap terhadap TIK 6. Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang beragam
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sumberdaya Manusia yang cukup 2. Tersedianya anggaran 3. Tersedianya sarana prasarana yang memadai 4. Tersedianya tupoksi yang mendukung penyebaran informasi, pengembangan TIK, Pos dan telekomunikasi 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pendayagunaan media informasi melalui peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung SDM yang cukup 3. Meningkatkan pendayagunaan media informasi melalui sarana prasarana secara optimal 4. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi 5. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Pos dan Telekomunikasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dalam mendukung pendayagunaan media informasi 2. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat melalui pendayagunaan media informasi 4. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik 5. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

	professional	
Kelemahan: 1.Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional 2.Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD 3.Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat 4.Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK	Alternatif Strategi : 1. Mengoptimalkan SDM dalam menghadapi Globalisasi informasi 2. Mengembangkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam bidang Kominfo yang siap menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi 3. Meningkatkan kebutuhan SDM untuk mengurangi Kesenjangan informasi di masyarakat 4. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kebutuhan Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 5. Meningkatkan sarana prasarana guna mengurangi Kesenjangan informasi di masyarakat 6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional Kominfo	Alternatif Strategi : 1. Mengembangkan sistem Informasi dalam menghadapi globalisasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 2. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi 3. Meningkatkan kemampuan potensi informasi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan informasi 4. Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi sistem informasi dan database dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik 5. Mengoptimalkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi guna mengurangi Kesenjangan informasi di masyarakat 6. Meningkatkan pember-dayaan potensi informasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi informasi

Tabel 5.1.2
Penentuan Strategi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan dan Penyebaran informasi serta keterbukaan informasi publik	Presentase Penyebaran Informasi publik yang disediakan untuk masyarakat	Meningkatkan penyebaran informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi
		Presentase Peningkatan KIM Yang Aktif	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat di Seluruh desa
		Presentase Pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi) di seluruh SOPD	Meningkatkan pengawasan dan kerja sama antar SOPD dalam hal pemantapan tugas dan tanggung jawab PPID
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Presentase penduduk yang menggunakan informasi publik Daerah	Meningkatkan sarana prasarana guna mengurangi kesenjangan informasi dimasyarakat.
		Presentase Pengaduan Masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi
3.	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	Presentase penyelesaian sengketa informasi	Mengembangkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam bidang kominfo yang siap menghadapi

4.	Meningkatnya pelayanan dan penyelenggaraan penyediaan informasi publik		globalisasi dan keterbukaan informasi
		Presentase Tersedianya aksesibilitas Informasi melalui media massa, Media Interpersonal, Pertunjukan rakyat, Media Luar ruangan tercetak /Terekam dan Pameran	Meningkatkan kemampuan potensi informasi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan informasi
		Presentase E-Government di seluruh SOPD	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan public
		Presentase Peningkatan keterjangkauan akses Internet sampai diseluruh desa	Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta infrastruktur jaringan diseluruh desa
		Presentase Indeks Kepuasan Informasi Website	Mengoptimalkan variabel kualitas informasi website,kualitas desain website dan kualitas penggunaanwebsite.
		Presentase Peningkatan Pengunjung Media center	Mengoptimalkan pelayanan dan kenyamanan pada pengunjung media center serta meningkatkan sarana prasarana penunjang Media Center

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA DAN PENDANAAN

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Boalemo dalam Rencana Strategis tahun 2017 -2022 merencanakan 6 Program dan 16 Kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi akan melaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra.

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam beberapa program dan kegiatan beserta kebutuhan pendanaan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun.

Program adalah bentuk dari suatu instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Boalemo 2017-2022. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program yang berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Setiap Program memiliki kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2017-2022 yang merupakan tindakan nyata yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan semaksimal mungkin.

Indikator kinerja secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Adapun Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Boalemo tersaji dalam tabel 6.1. di bawah ini :

BAB VII

KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian sebagai corong semua informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah Kabupaten Boalemo dalam 5 tahun ke depan memiliki posisi yang strategis dalam penyebaran informasi.

Penyebarluasan informasi tidak saja melalui media yang ada disekitar kita namun juga melalui website sebagai pelayanan publik TIK yang terus menerus berkembang sesuai dengan arah kemajuan zaman. Tidak bisa dipungkiri pelayanan publik melalui TIK saat ini sebagai kebutuhan vital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penyelenggaraan pemerintah menyesuaikan dengan perkembangan TIK sehingga kemajuan suatu pemerintah daerah akan dituntut juga penggunaan TIK dalam kegiatan pada masing-masing SOPD.

Sejalan dengan tupoksi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian maka komitmen yang dicapai sebagai indikator kinerja SOPD meliputi 2 hal yaitu : penyebarluasan informasi dan jaringan komunikasi publik, fasilitasi pelayanan publik melalui TIK yang secara rinci seperti tabel dibawah ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik Persandian
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD Tahun 2017	Targert Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Presentase Penyebaran Informasi publik yang disediakan untuk masyarakat		20%	30%	35%	50%	75%	75%
2	Presentase Peningkatan KIM Yang Aktif		10%	20%	35%	50%	70%	70%
3	Presentase Pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi) di seluruh SOPD		20%	30%	40%	80%	95%	95%
4	Presentase penduduk yang menggunakan informasi publik Daerah		10%	30%	50%	70%	80%	80%
5	Presentase Pengaduan Masyarakat		10%	20%	50%	80%	90%	90%
6	Presentase penyelesaian sengketa informasi		10%	20%	30%	40%	50%	50%
7	Presentase Tersedianya aksesibilitas Informasi melalui media massa, Media Interpersonal, Pertunjukan rakyat, Media Luar ruangan tercetak /Terekam dan Pameran		20%	40%	60%	80%	90%	90%
8	Presentase E- Government di seluruh SOPD		20%	40%	60%	80%	90%	90%
9	Presentase Peningkatan keterjangkauan akses Internet sampai diseluruh desa		10%	20%	25%	30%	35%	35%
10	Presentase Indeks Kepuasan Informasi Website		20%	25%	40%	50%	60%	60%
11	Presentase Peningkatan Pengunjung Media center		30%	45%	55%	75%	90%	90%

Pada indikator sasaran menunjukkan persentase kenaikan pada tiap tahun disebabkan karena kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dalam menyebarluasan informasi semakin meningkat dan dibutuhkan oleh masyarakat akan informasi kebijakan pemerintah yang dijalankan. Masyarakat dalam perkembangannya semakin kritis dalam menyikapi kebijakan atas penyelenggaraan pemerintah untuk memantau dan mengawasi kinerja para penyelenggara pemerintah sehingga dengan penyebaran informasi akan semakin mengetahui program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keterlibatan partisipasi masyarakat selalu dilibatkan dalam memberikan masukan penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja maupun kebijakan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan penyelenggara pemerintahan daerah. Masyarakat semakin hari selalu membutuhkan informasi yang up to date sehingga peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian semakin dituntut menyediakan informasi setiap saat dalam penyebaran informasi yang telah menjadi suatu kebutuhan pokok untuk masyarakat. Bahkan informasi diibaratkan sebagai bahan promosi yang akurat dari suatu badan publik untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapai tujuan.

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tahun 2017 – 2022 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi infomatika Statistik Dan Persandian.

Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebagus apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian menjadi SOPD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Kominfo, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhir kata, semoga Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Boalemo ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya good governance guna menuju terwujudnya masyarakat informasi Kabupaten Boalemo yang mandiri dan beretika melalui komunikasi dan informatika.

Tabel 6.1

PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2017 - TAHUN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan Output	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												BIDANG PENANGGUNG JAWAB
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		
							Target	-	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Meningkatkan pengetahuan ,kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik	1.1 Meningkatnya Pelayanan dan Penyebaran informasi serta keterbukaan informasi publik	2 10 2 10 01 101	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Presentase administrasi tertata dengan baik	90%	100%	1.250.000.000	100%	1.550.000.000	100%	1.550.000.000	100%	1.550.000.000	100%	1.850.000.000	100%	1.850.000.000	SEKRETARIAT
			2 10 2 10 01 101 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.200.000.000	1 paket	1.200.000.000	1 paket	1.200.000.000	1 paket	1.500.000.000	1 paket	1.500.000.000	SEKRETARIAT
			2 10 2 10 01 101 10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi Dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan	25 Kali	30 Kali	250.000.000	34 Kali	350.000.000	34 Kali	350.000.000	34 Kali	350.000.000	34 Kali	350.000.000	34 Kali	350.000.000	SEKRETARIAT
			2 15 2 10 01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Presentase OPD yang menerapkan teknologi informasi	63 %	70 %	35.000.000	75 %	45.000.000	80 %	45.000.000	90 %	45.000.000	100 %	50.000.000	100%	50.000.000	KOMINFO
			2 15 2 10 01 15 01	Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundangan Penyiaran dan KMIP	Jumlah peraturan perundangan penyiaran dan Kay Manajemen Improbability Protocol	1 perbup, 7 perdes	2 perbup, 15 perdes	35.000.000	3 perbup, 25 perdes	45.000.000	4 perbup, 35 perdes	45.000.000	5 perbup, 50 perdes	45.000.000	5 perbup, 60 perdes	50.000.000	5 perbup, 75 perdes	50.000.000	KOMINFO
			a	Penyusunan Peraturan Derah pengelolaan Informasi publik	Jumlah Peraturan daerah tentang pengelolaan informasi publik	1 perbup, 7 perdes	2 perbup, 15 perdes	35.000.000	3 perbup, 25 perdes	45.000.000	4 perbup, 35 perdes	45.000.000	5 perbup, 50 perdes	45.000.000	5 perbup, 60 perdes	50.000.000	5 perbup, 75 perdes	50.000.000	KOMINFO
			2 15 2 10 01 15 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika	o SOPD	10 SOPD	1.475.000.000	15 SOPD	1.975.000.000	20 SOPD	2.475.000.000	25 SOPD	2.975.000.000	30 SOPD	3.375.000.000	32 SOPD	3.475.000.000	KOMINFO
			a	Pemasangan Jaringan Internet SKPD dan area Blank spot	Jumlah jaringan Internet SKPD dan area Blank spot yang terpasang	10 SOPD	20 SOPD	1.000.000.000	25 SOPD	1.500.000.000	30 SOPD	2.000.000.000	33 SOPD	2.500.000.000	33 SOPD, 2 updt	2.900.000.000	33 SOPD, 5 updt	3.000.000.000	KOMINFO
			b	Konektivitas Aplikasi Sektoral dan Lintas Sektoral	Jumlah Aplikasi Sektoral dan Lintas Sektoral yang terkoneksi	o aplikasi	2 Aplikasi	450.000.000	3 Aplikasi	450.000.000	3 Aplikasi	450.000.000	3 Aplikasi	450.000.000	3 Aplikasi	450.000.000	3 Aplikasi	450.000.000	KOMINFO
			c	Sosialisasi Dan Pembinaan PPD sektoral dan Lintas Sektoral	Jumlah sektoral dan lintas sektoral yang diberikan Pembinaan PPD	o SOPD	10 SOPD	25.000.000	15 SOPD	25.000.000	20 SOPD	25.000.000	25 SOPD	25.000.000	30 SOPD	25.000.000	32 SOPD	25.000.000	KOMINFO
			2 15 2 10 01 15 03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika	2 Kgtan	2 Kgtan	765.000.000	2 Kgtan	915.000.000	2 Kgtan	1.010.000.000	2 Kgtan	1.140.000.000	2 Kgtan	1.238.000.000	2 Kgtan	1.238.000.000	KOMINFO
			a	sosialisasi internet sehat dalam bentuk dialog publik, dialog interaktif, cerdas cermat, ceramah	Jumlah peserta sosialisasi internet sehat	100 orang	125 org	25.000.000	150 org	35.000.000	200 org	40.000.000	225 org	45.000.000	250 org	50.000.000	250 org	50.000.000	KOMINFO
			b	pelayanan informasi/pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang diindak lanjuti	1 orang	10 org	10.000.000	20 org	15.000.000	30 org	20.000.000	35 org	25.000.000	40 org	30.000.000	40 org	30.000.000	KOMINFO
			c	Pelaksanaan PIN (Pekan Informasi Nasional) Tingkat Nasional	Jumlah kegiatan PIN (Pekan Informasi Nasional) yang di ikuti	o kegiatan	1 kali	100.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	100.000.000	KOMINFO
			d	Workshop Pengengalan Komputer dan Jaringan IT bagi Aparat Desa	Jumlah Aparat Desa yang mengikuti Workshop	o kegiatan	1 Kali	60.000.000	1 Kali	70.000.000	1 Kali	75.000.000	1 Kali	80.000.000	1 Kali	85.000.000	1 Kali	85.000.000	KOMINFO
			e	Pengembangan Aparatur Sumber Daya Manusia	Jumlah Aparatur Sumber Daya Manusia yang dikembangkan	o orang	5 orang	75.000.000	5 orang	75.000.000	5 orang	75.000.000	5 orang	75.000.000	5 orang	75.000.000	5 orang	75.000.000	KOMINFO
			f	Pendidikan Dan Pelatihan Pengembangan komunikasi Informasi	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan dalam pengembangan Komunikasi Informasi	4 orang	6 orang	250.000.000	8 orang	300.000.000	10 orang	350.000.000	12 orang	400.000.000	14 orang	450.000.000	14 orang	450.000.000	KOMINFO
			g	Meregrut SDM sebagai operator jaringan informasi di tiap desa dan kecamatan.	Jumlah tenaga /Operator jaringan informasi di desa	o orang	10 org	50.000.000	15 org	55.000.000	20 org	60.000.000	25 org	65.000.000	38 org	68.000.000	38 org	68.000.000	KOMINFO
			h	Bimtek dan Studi Banding Pengembangan SDM pengelola Media Center	Jumlah Bimtek yang pernah diikuti	2 Kegiatan	4 Kgtan	75.000.000	6 Kgtan	95.000.000	8 Kgtan	115.000.000	10 Kgtan	150.000.000	15 Kgtan	170.000.000	15 Kgtan	170.000.000	KOMINFO
			i	pelatihan SDM bidang kominfo	Jumlah pelatihan tentang SDM bidang kominfo yang pernah diikuti	3 Kegiatan	4 Kgtan	100.000.000	6 Kgtan	150.000.000	8 Kgtan	155.000.000	10 Kgtan	180.000.000	16 Kgtan	190.000.000	16 Kgtan	190.000.000	KOMINFO
			d	bimtek ,evaluasi, monitoring, konsultasi dim rangka penyelenggaraan informasi publik	Jumlah Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan informasi publik	2 Kegiatan	3 kgtan	10.000.000	3 kgtan	10.000.000	3 kgtan	10.000.000	3 kgtan	10.000.000	3 kgtan	10.000.000	3 kgtan	10.000.000	KOMINFO
			c	Pembinaan Komunitas Radio Amatir	Jumlah pembinaan komunitas Radio Amatir	0 kegiatan	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	KOMINFO
		1.2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	2 15 2 10 01 15 04	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Jumlah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang akan dilaksanakan	3 kegiatan	5 kgtan	65.000.000	6 kgtan	85.000.000	7 kgtan	100.000.000	8 kgtan	120.000.000	9 kgtan	150.000.000	9 kgtan	150.000.000	KOMINFO
			a	Konsultasi dan Koordinasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi	Jumlah kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam rangka pengembangan pengetahuan teknologi	3 kegiatan	5 kgtan	65.000.000	6 kgtan	85.000.000	7 kgtan	100.000.000	8 kgtan	120.000.000	9 kgtan	150.000.000	9 kgtan	150.000.000	KOMINFO
			2 15 2 10 01 15 05	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah Pengadaan Alat studio dan Komunikasi yang akan di adakan	1 Paket	2 Paket	265.000.000	2 Paket	590.000.000	2 Paket	2.590.000.000	2 Paket	850.000.000	2 Paket	1.065.000.000	2 Paket	3.200.000.000	KOMINFO
			a	Pengadaan Server Multi Media	Jumlah Server multi Media yang diadakan	o paket					1 paket	2.000.000.000					1 paket	2.000.000.000	KOMINFO
			b	Pengadaan Alat -alat studio	Jumlah Alat Alat studio yang diadakan	o paket	3 paket	65.000.000	3paket	90.000.000	3paket	90.000.000	4 paket	150.000.000	3paket	165.000.000	3paket	200.000.000	KOMINFO

				c. Pengadaan Alat -alat Komunikasi	Jumlah Alat Alat Komunikasi yang diadakan	3 set	5 set	200.000.000	7 set	400.000.000	8 set	500.000.000	10 set		700.000.000	12 set	900.000.000	12 set	900.000.000	KOMINFO														
				d. Pengadaan Software Wireshark	Jumlah Software Wireshark yang diadakan	0 paket			1 paket	100.000.000							1 paket	100.000.000		KOMINFO														
2	Meningkatkan layanan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi	2.1 Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	2	15	2	10	01	15	06	Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi		Jumlah pengkajian dan pengembangan sistem Informasi dilaksanakan	1 Kgtan	1 Kgtan	630.000.000	1 Kgtan	635.000.000	1 Kgtan	635.000.000	1 Kgtan	625.000.000	1 Kgtan	625.000.000	1 Kgtan	635.000.000	KOMINFO								
										a. Studi Kelayakan Pemasangan Internet	Jumlah Studi dilaksanakan dalam rangka kelayakan pemasangan internet	0 kegiatan	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000					1 kali	10.000.000		KOMINFO								
										b. pendataan dan pengawasan media elektronik	Jumlah pendataan dan pengawasan media elektronik yang dilaksanakan	0 media elektronik	6 media	10.000.000	8 media	10.000.000	8 media	10.000.000	8 media	10.000.000	8 media	10.000.000	8 media	10.000.000	8 media	10.000.000		KOMINFO						
										c. Pembuatan Web Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Boalemo	Jumlah web kominfo yang diadakan	o kegiatan	1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000		KOMINFO						
										d. kompetisi desain WEB maupun desain aplikasi	Jumlah kompetisi desain web dan desain aplikasi yang dilaksanakan	o paket	1 paket	350.000.000	1 paket	350.000.000	1 paket	350.000.000	1 paket	350.000.000	1 paket	350.000.000	1 paket	350.000.000	1 paket	350.000.000		KOMINFO						
										e. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah monitoring dan evaluasi penyelesaian informasi publik	o kegiatan	1 kali	10.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000		KOMINFO						
										Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi		Jumlah perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi yang akan diterapkan	1 Paket	1 Paket	95.000.000	1 Paket	750.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	2.095.000.000	1 Paket	95.000.000	1 Paket	2.745.000.000		KOMINFO							
										a. Peningkatan Kerja sama lintas sektoral rumpun organisasi Komunikasi	Jumlah kerja sama antar lintas sektor dan rumpun organisasi komunikasi	o kerja sama	1 Kerja sama	10.000.000	2 Kerja sama	15.000.000	2 Kerja sama	15.000.000	3 Kerja sama	10.000.000	3 Kerja sama	10.000.000	3 Kerja sama	10.000.000		KOMINFO								
										b. Pengadaan Sistem Aplikasi yang Terintegrasi disemua lembaga pemerintahan daerah	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	o aplikasi	2 Aplikasi	45.000.000	2 Aplikasi	45.000.000	2 Aplikasi	45.000.000	2 Aplikasi	45.000.000	2 Aplikasi	45.000.000	2 Aplikasi	45.000.000		KOMINFO								
										c. Kerja sama dan kemitraan bersama komunitas teknologi informasi berbasis potensi lokal	Jumlah Komunitas Teknologi Informasi yang melaksanakan kerja sama dan kemitraan	o kerja sama	1 Kerja sama	5.000.000	1 Kerja sama	5.000.000	1 Kerja sama	5.000.000	1 Kerja sama	5.000.000	1 Kerja sama	5.000.000	1 Kerja sama	5.000.000	1 Kerja sama	5.000.000		KOMINFO						
										d. Pembangunan dan Pengembangan Media Center Kab. Boalemo	Jumlah pembangunan dan pengembangan Media center	1 pembangunan yg tidak memadai			1 paket	650.000.000							1 paket	650.000.000		KOMINFO								
										e. pembangunan gedung data center	Jumlah pembangunan dan pengembangan Data center	belum ada							1 paket	2.000.000.000			1 paket	2.000.000.000		DISKOMINFO								
										f. Penyediaan Aplikasi Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi pengamanan informasi daerah	o aplikasi	1 aplikasi	35.000.000	1 aplikasi	35.000.000	1 aplikasi	35.000.000	1 aplikasi	35.000.000	1 aplikasi	35.000.000	1 aplikasi	35.000.000	1 aplikasi	35.000.000		DISKOMINFO						
										2		15	2	10	01	16	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI		Presentase OPD yang mempunyai akses internet	100%	100%	1.325.000.000	100%	1.309.000.000	100%	1.311.000.000	100%	1.315.000.000	100%	1.325.000.000	100%	1.325.000.000	DISKOMINFO	
										2		15	2	10	01	16	01	Pengkajian dan Penelitian bidang informasi dan komunikasi		Jumlah pengkajian dan penelitian bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan	1 Kgtan	1 Kgtan	1.325.000.000	1 Kgtan	1.309.000.000	1 Kgtan	1.311.000.000	1 Kgtan	1.315.000.000	1 Kgtan	1.325.000.000	1 Kgtan	1.325.000.000	DISKOMINFO
										a.		Survey Kepuasan user terhadap pelayanan informasi komunikasi Publik		Jumlah user yang telah disurvei dalam rangka peningkatan kepuasan pelayanan informasi komunikasi Publik	o user	50 user	25.000.000	80 user	29.000.000	100 user	31.000.000	125 user	35.000.000	130 user	45.000.000	130 user	45.000.000		DISKOMINFO					
										b.		Koordinasi dan Konsultasi pengkajian dan penelitian informasi komunikasi		Jumlah konsultasi dan koordinasi pengkajian dan penelitian Informasi Komunikasi	o kali	5 kali	150.000.000	7 kali	190.000.000	7 kali	190.000.000	7 kali	190.000.000	7 kali	190.000.000	7 kali	190.000.000		DISKOMINFO					
										c.		optimalisasi pemanfaatan teknologi Komunikasi dan Informasi		Jumlah teknologi Komunikasi Dan Informasi yang telah dioptimalkan	0 paket	2 paket	1.000.000.000	1 paket	900.000.000	1 paket	900.000.000	1 paket	900.000.000	1 paket	900.000.000	1 paket	900.000.000		DISKOMINFO					
										d.		Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Jumlah Konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan persandian pengamanan informasi	o kali	5 kali	150.000.000	7 kali	190.000.000	7 kali	190.000.000	7 kali	190.000.000	7 kali	190.000.000	7 kali	190.000.000		DISKOMINFO					
										2		15	2	10	01	18	PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA		Jumlah Berita yang termuat dalam media cetak dan elektronik	*10 Berita	300 Berita	1.175.000.000	360 brt	825.000.000	360 brt	1.200.000.000	360 brt	1.250.000.000	360 brt	800.000.000	360 brt	1.375.000.000	DISKOMINFO	
										2		15	2	10	01	18	01	Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah		Jumlah Berita dan Informasi Pembangunan Daerah yang tersebarluaskan melalui media massa	*10 Berita	300 Berita	1.175.000.000	360 brt	825.000.000	360 brt	1.200.000.000	360 brt	1.250.000.000	360 brt	800.000.000	360 brt	1.375.000.000	DISKOMINFO
										a.		Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi informasi daerah kemasyarakat		Jumlah peliputan dan pemberitaan dan dokumentasi informasi daerah	o kali	10 kali	100.000.000	20 kali	200.000.000	25 kali	250.000.000	30 kali	300.000.000	30 kali	300.000.000	30 kali	300.000.000		DISKOMINFO					
										b.		pembuatan Balihio		Jumlah balihio penyebaran informasi yang diadakan	o paket	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000		DISKOMINFO					
										c.		pembuatan leaflet		Jumlah Leaflet penyebaran informasi yang diadakan	o paket	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000		DISKOMINFO					
										d.		pembuatan film dokumenter pembangunan daerah		Jumlah Pembuatan film dokumenter penyebaran informasi yang diadakan	o paket	1 paket	300.000.000	1 paket	300.000.000	1 paket	300.000.000	1 paket	300.000.000	1 paket	300.000.000	1 paket	300.000.000		DISKOMINFO					
										e.		Pengadaan Kenderaan roda empat Operasional penunjang penyebaran informasi		Jumlah pengadaan kenderaan roda empat operasional penunjang kominfo	belum ada	1 paket	450.000.000			1 paket	450.000.000	1 paket	450.000.000			1 paket	450.000.000		DISKOMINFO					
f.		Pengadaan Kenderaan roda dua Operasional penunjang penyebaran informasi		Jumlah pengadaan kenderaan roda dua operasional penunjang kominfo baik roda empat dan roda dua	belum ada	1 paket	125.000.000	1 paket	125.000.000							1 paket	125.000.000		DISKOMINFO															
2		15	2	10	01	18	02	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah		Jumlah Berita dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tesebar melalui media massa	2 Berita	100 Berita	601.000.000	150 Berita	630.000.000	200 Berita	650.000.000	250 Berita	655.000.000	300 Berita	665.000.000	350 Berita	665.000.000	DISKOMINFO										
a.		Publikasi kegiatan Prioritas pemerintah daerah		Jumlah kegiatan publikasi masyarakat dalam rangka menyebarluaskan program prioritas pemerintah	0 publikasi	2 publikasi	25.000.000	3 publikasi	30.000.000	4 publikasi	35.000.000	5 publikasi	40.000.000	6 publikasi	45.000.000	6 publikasi	45.000.000		DISKOMINFO															
b.		publikasi program pemerintah daerah melalui keikutsertaan pameran		Jumlah pameran yg dilaksanakan dalam rangka mempublikasikan program prioritas daerah	o kali	2 kali	500.000.000	2 kali	500.000.000	2 kali	500.000.000	2 kali	500.000.000	2 kali	500.000.000	2 kali	500.000.000		DISKOMINFO															

